STRATEGI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI DALAM MENGATASI KRISIS EKONOMI

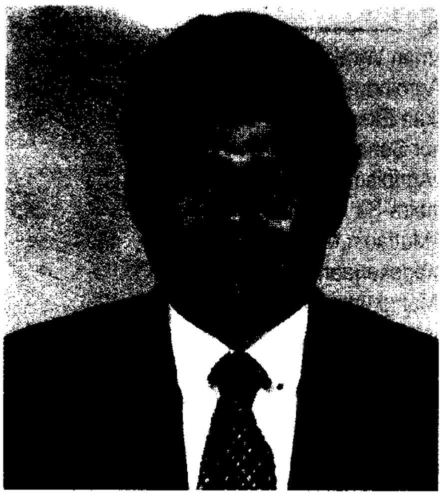

Oleh : Prof.Dr.Ir. Soleh Solahuddin, MSc
(Rektor Institut Pertanian Bogor)

Negara-negara industri maju yang kuat, seperti Amerika Serikat, Kanada, Perancis, Swiss, Inggris, Belanda, Jepang dan Australia, bukan hanya kuat dalam industri manufaktur dan jasanya, tetapi tangguh dalam agroindustrinya. Sebaliknya, negara bekas Uni Sovyet yang pada mulanya merupakan salah satu dari dua negara adikuasa, sekarang menjadi tertinggal, disebabkan antara lain oleh karena menomorduakan pembangunan sektor pertaniannya, sehingga mengalami kekurangan pangan yang cukup serius

I. KONDISI PEREKONOMIAN NASIONAL SAAT INI

Selain menghasilkan berbagai kemajuan yang sangat berarti dalam meningkatkan kesejahteraan dan harkat masyarakat Indonesia, pem-bangunan selama PJP I menimbulkan sejumlah masalah besar yang kemudian memberikan andil dalam menciptakan krisis ekonomi dan moneter dewasa ini. Beberapa persoalan dan faktor penyebab rapuhnya ekonomi nasional dalam menghadapi krisis ekonomi dan moneter tersebut adalah sebagai berikut. **Pertama**, industrialisasi yang berkembang pada PJP I lebih banyak bertumpu pada *foot loose industry* dan digerakkan oleh kecenderungan industrialisasi di negara-negara maju. Industri semacam ini sangat tergantung pada komponen impor, sehingga ketergantungan tersebut menjadi salah satu penyebab krisis yang utama.

Kedua, industri yang berkembang berorientasi pada substitusi impor dan lambat mengubah orientasi kearah promosi ekspor. Bahkan selama PJP I orientasi ke dalam *(inward looking)* hampir bersifat total, dan ternyata berakibat panjang yang mencakup berbagai persoalan ekonomi politik (Damanhuri, 1997; dalam Solahuddin (1998)). **Ketiga,** pelaku-pelaku dalam industrialisasi tersebut kurang memiliki etos kerja yang professional, dan masih terbatas pada kelompok tertentu dengan sejumlah fasilitas dalam berbagai bentuk proteksi yang selanjutnya menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Terkonsentrasinya para pelaku industri pada segelintir orang membuat kecilnya akses bagi pengembangan usaha kecil menjadi usaha menengah. Selanjutnya minimnya usaha menengah yang mandiri memberikan andil besar dalam rapuhnya perekonomian nasional.

Walaupun cukup memberikan andil yang besar dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup tinggi, yakni sedikitnya 7% pertahun selama pelita VI, pengembangan industri yang tidak berakar kuat di Indonesia tersebut telah menelan investasi yang sangat besar, sehingga utang luar negeri swasta yang sangat besar. Berdasarkan data terakhir dari BI 13 Mei 1998, Utang luar negeri Indonesia per akhir Februari 1998 131.7 milyar US $ diantaranya US $ 53,5 milyar adalah utang pemerintah yang seluruhnya berjangka panjang, dan US $ 78.2 milyar adalah utang swasta termasuk didalamnya utang BUMN (Kompas, Jum'at 15 Mei 1998)

Salah satu penyebab lain dari kekurangberhasilan memfokuskan pembangunan ekonomi nasional pada industri yang berakar kuat di Indonesia tersebut adalah adanya persepsi yang salah bahwa kemajuan suatu bangsa tidak mungkin dicapai melalui pemberdayaan sektor pertanian. Anggapan tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh salah penafsiran dari teori tahapan pembangunan (Rostow, 1960); Fisher dan Clark, 1978; dalam Solahuddin (1998) yang menyatakan bahwa tahapan kemajuan (pembangunan) berawal dari sektor primer (pertanian, pertambangan dan sumber daya alam lainnya; sektor skunder (industri manufaktur); dan sektor tersier (jasa). Teori lama tersebut mengandung beberapa kelemahan dan secara empiris-kontemporer ternyata tidak berlaku, khususnya apabila jumlah penduduk yang besar, yang memerlukan konsumsi bahan primer (sandang dan pangan) yang sangat besar, yang sangat besar kurang diperhitungkan.

Yang dimaksud dengan sektor sekunder seharusnya tidak hanya industri manufaktur, tetapi juga agro industri. Negara-negara industri maju yang kuat, seperti Amerika Serikat, Kanada, Perancis, Swiss, Inggris, Belanda, Jepang dan Australia, bukan hanya kuat dalam industri manufaktur dan jasanya, tetapi tangguh dalam agroindustrinya. Sebaliknya, negara bekas Uni Sovyet yang pada mulanya merupakan salah satu dari dua negara adikuasa, sekarang menjadi tertinggal, disebabkan antara lain oleh karena menomorduakan pembangunan sektor pertaniannya, sehingga mengalami kekurangan pangan yang cukup serius.

Pada PJP II , kegiatan ekonomi pada sektor pertanian yang terbatas pada usahatani primer harus lebih dipacu pengembangannya menjadi mega sektor yang disebut agribisnis. Kinerja agribisnis (Saragih, 1997; dalam PSP-IPB, 1997a) meliputi tiga kegiatan yakni: pertama, sub-sektor organisasi hulu yakni kegiatan ekonomi yang menghasilkan dan menyalurkan sarana produksi usahatani; kedua, sub-sektor usahatani; dan ketiga sub-sektor agribisnis hilir yakni kegiatan ekonomi yang mengolah hasil usahatani dan perdagangan, atau agroindustri. Pada makalah ini terminologi agribisnis lebih mengacu kepada kegiatan usahatani, sedangkan agroindustri mengacu kepada industri pengolahan hasil usaha tani di atas.

Krisis ekonomi dewasa ini tidak perlu terjadi apabila selama PJP I pemerintah konsisten untuk terus meningkatkan ketangguhan sektor pertanian, baik untuk pemenuhan kebutuhan domestik maupun untuk kepentingan ekspor melalui pengembangan agribisnis dan agroindustri. Pengembangan agribisnis dan agroindustri sangat strategis karena : (1) *bersifat resources based* yang berarti tidak tergantung pada komponen impor dalam proses produksinya, sehingga akan menjadi sektor yang dapat menanggulangi krisis moneter seperti yang saat ini terjadi, (2) meningkatkan devisa karena umumnya kegiatan agroindustri berorientasi ekspor dan ini terbukti dengan kenyataan bahwa pada kurun waktu 1981-1995 agroindustri menyumbang 50% ekspor non migas dan 30% total ekspor Indonesia, dan (3) memiliki dimensi pemerataan karena memiliki keterkaitan ke depan *(forward linkages)* dan ke belakang *(backward linkages)* yang kuat dengan kegiatan agribisnis dan yang digerakkan para petani dan pengusaha. Dengan landasan pengembangan agribisnis dan agroindustri yang kuat, Indonesia akan mampu melangsungkan proses industrialisasi secara wajar dan seimbang, sebagaimana yang dialami oleh negara-negara maju yang telah berhasil lebih dahulu.

Sub-sektor tanaman pangan dan peternakan memerlukan investasi semakin banyak untuk mencukupi kebutuhan konsumsi di dalam negeri. Sebaliknya, subsektor perkebunan seyogyanya dioptimalkan pemberdayaannya untuk menggaet devisa yang semakin besar. Hal yang sama juga seyogyanya dioptimalkan untuk agroindustri di sektor kehutanan, yang sejak lama telah terbukti sebagai penggaet devisa yang sangat diandalkan di Indonesia

Sebagai negara agraris dan maritim, Indonesia sudah seharusnya menjadikan agribisnis dan agroindustri sebagai penghela pembangunan ekonomi nasional yang paling utama. **Pertama**, pada era pertumbuhan nol persen, agribisnis dan agroindustri akan mampu meningkatkan peluang pertumbuhan ekonomi ke arah pertumbuhan yang lebih baik dan positif. **Kedua**, 60% angkatan kerja nasional atau sekitar 70 - 80% jumlah penduduk masih menggantungkan hidupnya pada sektor agribisnis dan agroindustri, sehingga pengembangan agribisnis dan agroindustri sebagai komitmen nasional tidak dapat ditawar lagi. **Ketiga**, pengembangan agribisnis yang konsisten akan mampu memberikan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan sosial, yang lebih baik di Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia, serta di seluruh perdesaan dan perkotaan. Pemerataan pembangunan ini akan mampu meningkatkan ketahanan nasional yang semakin baik. **Keempat**, pada keadaan krisis ekonomi yang sulit saat ini, dalam jangka pendek diduga hanya sektor agribisnis dan agroindustri yang mampu membantu menyediakan pangan yang cukup bagi 203 juta jiwa penduduk Indonesia, melalui proyek padat karya agribisnis dan agroindustri dan menekan impor pangan (beras, jagung, kedele, gula dll) semaksimal mungkin. Dilain pihak, peluang menggenjot ekspor dari hasil kegiatan agroindustri untuk menghasilkan devisa yang segera semakin menjadi penting dan lebih besar, bila dibandingkan dengan sektor industri, properti dan jasa, yang saat ini mengalami kelumpuhan yang cukup meresahkan.

2. PERANAN AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI

2.1. TINJAUAN UMUM

Dengan mengacu kepada batasan, ruang lingkup dan peranan industri strategis dan industrialisasi (Habibie, 1998) kegiatan agroindustri merupakan **aktivitas** utama dan **prioritas** utama. Oleh karena itu, industrialisasi di Indonesia harus berkembang industri agrikultur dalam arti yang seluas-luasnya (Habibie, 1998; lihat Republika 12 Februari 1998). Ini berimplikasi bahwa agribisnis dan agroindustri harus berkembang dengan mantap dan mandiri, serta berorientasi pasar dalam negeri dan ekspor, karena kemantapan agribisnis dan agroindustri akan menjadi penghela industrialisasi di Indonesia. Memperhatikan perkiraan elastisitas permintaan akan hasil produksi tanaman bahan makanan dan peternakan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga, perkiraan laju pertumbuhan PDB dan Produk Nasional Bruto (PNB), serta laju pertumbuhan kredit untuk perorangan yang berasal dari Bank Umum selama periode 1993 sampai September 1997 (PSP-IPB,1997b), maka diperkirakan laju pertumbuhan sub-sektor tanaman bahan makanan dan peternakan selama Pelita VI terlalu rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan permintaannya. Sebagai implikasinya, maka diperkirakan akan berdampak negatif terhadap laju pertumbuhan ekspor dan impor serta kenaikan harga bahan makanan selama Pelita VI.

Walaupun perdagangan bahan makanan dari Indonesia selama kurun waktu 1985 - 1994 cenderung meningkat, tetapi sebaliknya dari kurun waktu 1994-1996 menunjukan kecenderungan yang terus menurun, walaupun dalam periode terakhir tersebut neraca perdagangan untuk minyak nabati dan hewani mengalami peningkatan yang cukup berarti. Dari rincian lebih lanjut mengenai neraca perdagangan bahan makanan selama kurun waktu 1985-1997, ternyata Indonesia senantiasa menjadi pengimpor neto untuk hasil produksi tanaman bahan makanan, peternakan dan lainnya. Di lain pihak untuk hasil produksi tanaman perkebunan dan perikanan, Indonesia mampu menjadi pengekspor neto (PSP-IPB, 1997b).

Apabila dikaji potensinya berdasarkan persentase total produksi pada tahun 1995 menurut kelompok komoditi, maka subsektor tanaman pangan menempati urutan teratas (52,9%), disusul oleh tanaman perkebunan (16,0%), perikanan (10.8%) dan perhutanan (10,1%) serta peternakan (10,1%) (Indonesia, 1997b).

Bagi Indonesia, pemenuhan kebutuhan pangan merupakan masalah yang sangat serius karena dengan jumlah penduduk yang sangat besar (sekitar 203 juta jiwa pada tahun 1998 dan diperkirakan akan mencapai 220 juta jiwa pada tahun 2020) kebutuhan pasokan pangan menjadi sangat besar pula. Sejarah pembangunan Indonesia menunjukan bahwa masalah keamanan pangan sangat erat kaitannya dengan stabilitas ekonomi (khususnya inflasi), biaya hidup dan stabilitas sosial politik nasional

Namun demikian, berbagai kajian di atas menyiratkan bahwa sub-sektor tanaman pangan dan peternakan memerlukan investasi semakin banyak untuk mencukupi kebutuhan konsumsi di dalam negeri. Sebaliknya, subsektor perkebunan seyogyanya dioptimalkan pemberdayaannya untuk menggaet devisa yang semakin besar. Hal yang sama juga seyogyanya dioptimalkan untuk agroindustri di sektor kehutanan, yang sejak lama telah terbukti sebagai penggaet devisa yang sangat diandalkan di Indonesia. Ekspor produk hasil hutan, yang berasal dari industri kayu (US $ 5.502 milyar) dan pulp dan kertas (US $ 1.452 milyar) pada tahun 1995 telah mengungguli dua kelompok barang ekspor utama Indonesia non-migas, yakni barang pakaian dan tekstil (US $ 6.044 milyar) dan elektronik (US $2.492 milyar) (Indonesia, 1997a).

Untuk mengantisipasi gejolak ekonomi yang semakin parah, pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan, yang sangat ditentukan oleh peningkatan konsumsi domestik, investasi, pengeluaran pemerintah dan nilai ekspor bersih harus dikaji secara seksama, sehingga semua elemen-elemen di atas menghasilkan kinerja yang positif. Untuk saat ini, pemenuhan konsumsi domestik dan peluang peningkatan ekspor untuk menggaet devisa harus diarahkan melalui pengembangan agribisnis dan agroindustri, sedangkan investasi pada kegiatan agribisnis dan agroindustri sewajarnya dipermudah dan ditingkatkan jumlahnya.

Dari sisi penawaran, peranan agribisnis dan agroindustri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dipacu melalui peningkatan produktifitas tenaga kerja, khususnya dalam berbagai pelaksanaan proyek padat karya, peningkatan teknologi budidaya dan proses hilir agroindustri, serta akumulasi modal melalui ekspor produk agroindustri yang telah mempunyai nilai tambah yang besar di dalam negeri. Ketiga kegiatan tersebut mempunyai momentum yang tepat, saat ini, dimana pertumbuhan ekonomi yang cepat akan sulit diperoleh dari sektor-sektor ekonomi lainnya di Indonesia.

Diharapkan, dalam waktu yang tidak lama, pemulihan ekonomi Indonesia dapat terwujud, sehingga kerawanan sosial akibat kesulitan ekonomi dalam mendapatkan sembilan bahan pokok dan kebutuhan dasar hidup lainnya dapat terpenuhi.

2.2. JAMINAN PENGADAAN PANGAN

Salah satu dampak yang sangat meresahkan dari krisis ekonomi saat ini adalah kelangkaan bahan pangan di pasaran, sehingga harga bahan sangat drastis melonjak. Dilain pihak daya beli masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah sangat rendah, sehingga terbukti telah menimbulkan kerawanan sosial yang akhir-akhir ini merebak diberbagai daerah di Indonesia.

Bagi Indonesia, pemenuhan kebutuhan pangan merupakan masalah yang sangat serius karena dengan jumlah penduduk yang sangat besar (sekitar 203 juta jiwa pada tahun 1998 dan diperkirakan akan mencapai 220 juta jiwa pada tahun 2020) kebutuhan pasokan pangan menjadi sangat besar pula. Sejarah pembangunan Indonesia menunjukan bahwa masalah keamanan pangan sangat erat kaitannya dengan stabilitas ekonomi (khususnya inflasi), biaya hidup dan stabilitas sosial politik nasional. Dengan demikian sudah menjadi tuntutan yang wajar bahwa pembangunan agribisnis dan agroindustri seyogianya dilaksanakan merata di seluruh penjuru tanah air, agar kendala jarak dan kesulitan dalam pendistribusian produknya dapat dihindari.

Sebagian pengadaan bahan pangan, khususnya untuk komoditi yang dapat dibudidayakan dengan baik di Indonesia, misalnya beras, jagung, gula, serta beragam produk hortikultura (buah-buahan dan sayuran) yang kini masih berlangsung, sangat ironis, karena seringkali masih dilakukan melalui impor. Selain sangat menguras devisa, impor tersebut memberikan citra negatif kepada Indonesia, karena secara tidak langsung Indonesia dianggap sebagai suatu bangsa yang lemah dan tidak dapat mengelola sumberdayanya dengan baik.

Di lain pihak, konsumsi kedele yang sangat besar, yang mengharuskan impor sekitar 700.000 - 1 juta ton per tahun, memerlukan jalan keluar yang tepat, dengan mengembangkan agribisnis tanaman tersebut di wilayah-wilayah yang sesuai. Khusus untuk impor gandum,yang jumlahnya semakin meningkat (kini mencapai lebih dari 4 juta ton pertahun) (CIC, 1997) perlu antisipasi yang segera agar tidak lebih banyak lagi menguras devisa, bahkan seyogyanya digantikan peranannya oleh tepung-tepung lain yang dapat diproduksi oleh Indonesia sendiri, misalnya tepung ubi kayu, tepung sagu, tepung garut, tepung ganyong, tepung pisang dan lain-lain.

Peranan agribisnis dan agroindustri dalam ekspor nasional cukup besar, dengan pangsanya yang meningkat. Produk-produk agribisnis dan agroindustri adalah tulang punggung perolehan devisa Indonesia, bersama-sama dengan industri minyak dan gas bumi, hasil pertambangan lainnya, dan industri garmen serta tekstil

Dalam upaya menyediakan kebutuhan protein hewani, diperlukan usaha yang sangat serius untuk meningkatkan produksi peternakan, seperti daging, telur, susu, dan turunan-turunannya. Selain itu peningkatan produk jagung dan kedele yang sangat diperlukan untuk formulasi pakan seyogyanya dikurangi dan diganti oleh komoditi lain yang tidak bersaing dengan kebutuhan pangan masyarakat. Oleh karena itu tanaman dan produksi pakan yang non-konvensional berpotensi mendapatkan peluang pengembangannya.

Impor bakalan sapi (sekitar 500 - 700.000 ekor pertahun) perlu dikaji lagi dengan mengembangkan ternak kerbau dan perolehan daging alternatif lainnya, misalnya kambing, domba dan ternak lainnya. Terdapat kecenderungan bahwa konsumsi masyarakat akan produk-produk daging akan semakin meningkat, sehingga diduga akan terjadi impor produk-produk peternakan yang semakin tinggi.

Kebutuhan protein juga dapat dipasok dari sektor perikanan, baik ikan air tawar maupun ikan laut. Pada saat ini posisi sektor perikanan sangat kuat dalam mencukupi kebutuhan ikan nasional, bahkan menghasilkan devisa yang cukup besar melalui ekspor udang, tuna, ikan lainnya, mutiara, kerang-kerangan, rumput laut dan sebagainya. Dengan mengkaji potensi yang sangat besar di perairan Indonesia, maka agribisnis dan kegiatan agroindustri di bidang perikanan sangat potensial untuk dikembangkan.

2.3. PEROLEHAN DEVISA

Peranan agribisnis dan agroindustri dalam ekspor nasional cukup besar, dengan pangsanya yang meningkat. Produk-produk agribisnis dan agroindustri adalah tulang punggung perolehan devisa Indonesia, bersama-sama dengan industri minyak dan gas bumi, hasil pertambangan lainnya, dan industri garmen serta tekstil. Menurut **PSP-IPB** (1997) dari data ekspor Indonesia (Statistik Perdagangan, 1996) total nilai ekspor Indonesia **(US** $25.67 Milyar pada tahun 1990), sekitar 43.4% atau **US $ 11.15** milyar berasal dari ekspor produk-produk sektor agribisnis dan agroindustri. Kemudian pada tahun

1995, dari nilai total ekspor Indonesia sebesar **US $** 45.4 milyar, sekitar 55.6% atau **US $** 25.3 milyar berasal dari produk-produk agribisnis.

Salah satu sektor yang sangat potensial untuk menopang perolehan devisa non-migas di Indonesia adalah sektor kehutanan, khususnya pengolahan kayu. Hasil perolehan devisa dari ekspor *plywood, sawn timber, pulp* dan *kertas, moulding* dan lain sebagainya untuk Pelita V adalah **US $** 25.3 milyar dan untuk Pelita VI sebesar US $37.6 milyar (Departemen Kehutanan 1977 dalam Nurendah, 1997).

Komoditi perkebunan adalah salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia dari ekspor produk karet, kopi, teh, dan minyak kelapa sawit. Ekspor karet pada tahun 1995 berjumlah 1.3 juta ton setara dengan US $ 1.963 milyar, ekspor kopi dan teh tahun 1995, masing-masing bernilai US $ 606 juta dan US $ 87.7 juta, sedangkan nilai ekspor minyak kelapa sawit pada tahun 1995 mencapai US $ 747 juta (Indonesia, 1977a).

Selain itu komoditi udang dan produk laut lainnya menyumbang devisa yang besar, yakni pada tabun 1995 mencapai nilai US $ 1.032 milyar. Untuk kelompok komoditi ini Jepang adalah importir yang terbesar (81.3%) (Indonesia, 1997a).

2.4. PENYERAPAN TENAGA KERJA

Pengembangan agribisnis dan agroindustri sangat penting artinya bagi kesejahteraaan angkatan kerja masyarakat Indonesia. Dari data BPS (1997) angkatan kerja Indonesia pada tahun 1994 berjumlah 82 juta jiwa, sekitar 46% atau 38 juta jiwa bekerja di sektor usaha tani. Apabila rata-rata satu keluarga berjumlah 4 orang, maka sekurang-kurangnya 70% dari jumlah penduduk Indonesia menggantungkan kehidupan ekonominya pada sektor tersebut.

Keadaan ini menyiratkan bahwa pada keadaan ekonomi yang sulit, dimana PHK dari sektor lain (industri dan jasa) meningkat, maka jumlah masyarakat yang akan turun kembali ke desa akan semakin besar. Oleh karena itu penciptaan lapangan kerja baru, atau program padat karya pada sektor agribisnis dan agroindustri menjadi suatu tuntutan.

Mencontoh program padat karya yang dilakukan di Amerika Serikat pada saat krisis ekonomi pada tahun 1931, dimana masyarakat dihimbau untuk kembali ke desa dan melaksanakan program penanaman pohon (hortikultura dll) dan tanaman kehutanan, memberikan hasil yang baik, yakni selain masyarakat mendapatkan pekerjaan, bibit pohon yang ditanam menghasilkan kebutuhan sandang dan pangan, selain membuat hutan lebih hijau, lestari dan mampu menyerap polusi dari pengembangan industri di sekitarnya.

Untuk melaksanakan pembangunan wilayah yang merata di seluruh tanah air, baik melalui program transmigrasi maupun melalui ekstensifikasi agribisnis, diperlukan terobosan pengembangan kawasan agribisnis dan agroindustri yang memiliki ciri keberlanjutan dan berwawasan lingkungan

2.5. PASOKAN OBAT-OBATAN

Salah satu dampak yang dipicu oleh krisis ekonomi dan moneter yang terjadi saat ini adalah kelangkaan obat-obat paten, yang harganya semakin meningkat dengan tajam. Hal ini sangat merawankan karena daya beli masyarakat yang rendah menyebabkan masyarakat yang mengalami sakit menjadi sulit untuk ditolong. Diperlukan alternatif teknologi untuk menyediakan bahan baku obat yang dihasilkan oleh sumberdaya alam yang ada di Indonesia.

Mengutip catatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO),Tsauri (1994) dalam Saono *et al.* (1 994) menyatakan bahwa lebih 20 000 jenis tumbuhan di bumi dapat dimanfaatkan sebagai obat. Dengan perkiraan 11% jenis tumbuhan dunia dapat dijumpai di hutan tropis Indonesia, maka sekurang-kurangnya terdapat 2 200 jenis tumbuhan obat terdapat di alam Indonesia. Di lain pihak, menurut mantan Menteri Kehutanan, Djamaluddin Suryohadikusumo (dalam Gumbira-Sa'id dan Nuraini, 1998) hutan tropis Indonesia diperkirakan memiliki 28 000 jenis tumbuhan, 350 000 jenis binatang dan 110 000 jenis mikroorganisme yang hidup secara alami. Dari keseluruhan jumlah tumbuhan berbunga di dunia, sekitar 10% nya terdapat di alam Indonesia.

Selain itu, menurut Sudarmono (1994) dalam Gumbira-Sa'id dan Nuraini (1998) tidak kurang dari 45 macam obat penting telah diedarkan di Amerika Serikat dan 14 jenis diantaranya ditemukan tersebar di hutan-hutan Indonesia. Salah satu contohnya adalah obat anti kanker Vinblastin dan Vinkristin yang berasal dari tanaman tapak dara, dan obat anti hipertensi Reservin yang berasal dari pule pandak. Potensi di atas dan jamu-jamu tradisional yang telah terbukti khasiatnya, memberikan suatu harapan bagi perolehan pasokan obat alternatif di Indonesia. Dengan dorongan investasi yang memadai Indonesia bahkan dapat menjadi pemasok obat-obatan penting untuk menyembuhkan penyakit-penyakit modern di masa depan.

2.6. PENGEMBANGAN WILAYAH

Untuk melaksanakan pembangunan wilayah yang merata di seluruh tanah air, baik melalui program transmigrasi maupun melalui ekstensifikasi agribisnis, diperlukan terobosan pengembangan kawasan agribisnis dan agroindustri yang memiliki ciri keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Keberlanjutan mencirikan visi untuk pengembangan wilayah dari segala dari pandang, sedangkan berwawasan lingkungan menjadi wahana bagi kawasan agribisnis dan agroindustri yang resisten terhadap segala gangguan alam dan manusia serta menghindari kerusakan sumberdaya alam yang lebih lanjut.

Untuk mencapai keseimbangan tersebut pendekatan *resource-based* merupakan kekuatan pengembangan yang paling optimal. Hal ini berimplikasi menjadikan bioteknologi (dari hulu ke hilir) sebagai basis pengembangan yang dapat memudahkan melakukan pendekatan *resource based* di atas (Gumbira-Sa'id dan Burhanuddin, 1996). Selain itu diperlukan juga penerapan konsep produksi bebas limbah agar semua sumberdaya dan kegiatan agribisnis dan agroindustri dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Konsepsi ini telah mulai diterapkan di IPB (Solahuddin, 1997).

Pertanian, kehutanan, dan transmigrasi mempunyai keterkaitan yang sangat erat di lapangan. Kawasan hutan merupakan sumber penyedia lahan sektor pertanian, transmigrasi dan sektor lainnya. Selama ini sering terjadi adanya rencana penggunaan lahan yang tidak terkoordinasi sehingga terjadi kelambatan pembangunan di sektor non-kehutanan, karena belum adanya pelepasan kawasan hutan, dan juga adanya pembangunan kehutanan yang terganggu akibat adanya penggunaan lahan hutan yang mendadak oleh sektor lainnya. Berdasarkan keterkaitan yang sangat erat itu, seyogyanya dalam kerangka pengembangan wilayah, kegiatan pertanian, kehutanan dan transmigrasi dikelola secara terpadu.

3. STRATEGI PENGEMBANGAN

3.1. PERTIMBANGAN UMUM

Walaupun memiliki potensi yang besar, pengembangan agribisnis dan agroindustri juga masih memiliki berbagai kendala. Kendala yang dihadapi pada pembangunan agroindustri di Indonesia diantaranya adalah:

1. Masih terbatasnya ketersediaan lahan yang sesuai untuk pengembangan usaha dalam skala komersial, sedangkan konversi hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan memerlukan biaya yang cukup besar.
2. Kemudahan mendapatkan modal bagi semua skala usaha masih terbatas karena belum adanya sistem insentif yang memadai.
3. Kualitas sumberdaya manusia yang relatif masih rendah, baik dalam ketrampilan kerja maupun pada motivasinya.
4. Daya serap teknologi aplikatif yang sangat lambat.
5. Keberlangsungan kemitraan usaha yang belum kondusif.
6. Pemerataan kesempatan berusaha yang masih kecil, khususnya untuk skala usaha kecil dan menengah.
7. Tingkat pencemaran lingkungan akibat proses industri yang kurang baik masih tinggi.
8. Kegiatan penelitian dan pengembangan belum memberikan kontribusi yang nyata pada perbaikan proses atau produk yang mempunyai nilai tambah yang tinggi.

Program jangka pendek difokuskan untuk menyediakan bahan pangan yang cukup dan lapangan kerja dengan penekanan teknologi padat karya dan menggunakan bahan lokal

3.2. STRATEGI JANGKA PENDEK

Menyimak berbagai kendala di atas, strategi yang perlu dilakukan untuk mengatasi krisis ekonomi dan moneter dapat dibagi menjadi dua bagian program, yaitu strategi jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek difokuskan untuk menyediakan **bahan pangan** yang cukup dan **lapangan kerja** dengan penekanan **teknologi padat karya** dan menggunakan **bahan lokal.** Dengan demikian agribisnis dan agroindustri yang dikerjakan dan perlu diciptakan dan dibina saat ini adalah kegiatan yang dapat dengan cepat mengatasi pengangguran dan dapat mengatasi krisis pangan serta menghasilkan produk yang dapat mengganti muatan impor.

Sebagai contoh minyak goreng yang saat ini pada umumnya diproduksi dari minyak kelapa sawit (CPO) dimana produksinya dilakukan pada skala besar, dapat diperoleh dari kelapa yang diusahakan oleh perkebunan rakyat. Sementara CPO berhasil dengan baik, petani kelapa dan kopra menjadi kurang diuntungkan karena tidak diprioritaskan bahkan ditinggalkan. Di lain pihak, menghadapi krisis seperti ini minyak goreng asal CPO meningkat harganya dan bahkan hilang di pasaran, sementara minyak kelapa tidak banyak yang memproduksi lagi.

Dalam menghadapi krisis ekonomi dan moneter saat ini, pemerintah sudah saatnya membuat suatu gerakan agroindustri pedesaan dengan mengoptimalkan "*local specific product*" di masing-masing wilayah. Dengan demikian program padat karya yang ada saat ini dapat disalurkan menjadi pekerjaan yang berkelanjutan.

Mengingat kendala yang ada cukup banyak, strategi yang dapat dilakukan) adalah:

1. Menyediakan lahan-lahan pertanian (terutama lahan tidur) untuk komoditas unggulan agribisnis yang berorientasi kepada mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri, mampu menunjang kesehatan masyarakat dan berorientasi ekspor.
2. Menyediakan bibit, benih dan pupuk untuk melakukan budidaya sistem tumpangsari, penghijauan lahan dan melakukan reboisasi secara besar-besaran.
3. Menyalurkan permodalan dengan memilih penyalur modal yang tidak terhambat dalam birokrasi distribusi kredit.
4. Menjaga peningkatan mutu SDM tetap berlangsung dan menciptakan sarjana terdidik untuk terjun langsung sebagai pembina dan konsultan di lapangan, sekaligus menyediakan lapangan kerja bagi sarjana dengan masa kontrak yang relatif singkat. Sarjana terdidik akan sangat bermanfaat karena mereka akan terjun langsung ke lapangan menjadi fasilitator, komunikator dan dinamisator sekaligus pemecah masalah di masyarakat. Kesempatan ini akan digunakan mereka untuk merancang wirausaha baru yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.
5. Teknologi sederhana, yang mudah diterapkan dan dapat diperbaharui serta menyerap tenaga kerja perlu diintroduksikan secara cepat.
6. Pembenahan dan peningkatan infrastruktur yang mendukung kinerja pembangunan agribisnis dan agroindustri.

Ketersediaan infrastruktur (terutama transportasi jalan, komunikasi, informasi dan energi listrik) yang memadai sangat diperlukan dalam pembangunan agribisnis dan agroindustri, mengingat produknya yang mudah rusak atau busuk. Oleh karena itu, kecepatan mentransportasi produk dari lokasi produsen ke lokasi konsumen sangat penting.

3.3. STRATEGI JANGKA PANJANG

1) Penerapan pendekatan sistem agribisnis secara utuh dan terpadu.

   Dalam kurun PJP I pendekatan pembangunan pertanian pada umumnya dilakukan secara terpilah-pilah. Pengembangan suatu produk (komoditi) hanya memfokuskan pada aspek produksi, dan merupakan aspek pemasaran. Oleh karena itu, peningkatan produktifitas pertanian acapkali tidak dapat terjual dengan harga yang menguntungkan petani. Dimasa depan, orientasi pasar hendaknya dijadikan pertimbangan utama di dalam pengembangan produk.

2) Penerapan IPTEK yang relevan.

   Untuk dapat menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi dan mengandung nilai tambah, maka penerapan IPTEK (seperti bioteknologi,*ecofarming*, *sea-ranching* dan *mariculture*, *computer and robotic technology*, sistem dan teknologi informasi) pada agribisnis dan agroindustri adalah mutlak.

**Untuk menjamin kelestarian produksi dan kepastian berusaha diperlukan tatanan hukum yang jelas, berwibawa dan adil.
Oleh karena itu, perangkat hukum yang ada
dan benar harus ditegakkan
dan aspek-aspek yang belum ditata secara hukum perlu segera dibuat perangkat hukumnya**

3) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan agribisnis dan agroindustri sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan kondisi lingkungan wilayah (keunggulan komparatif).

   Hal ini sangat penting untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi produksi. Misalnya pulau Sumatra untuk industri perkebunan dan hortikultura, pulau Jawa untuk tanaman pangan dan hortikultura, pulau Kalimantan untuk industri perhutanan, dan Kawasan Timur Indonesia untuk agroindustri perikanan dan kelautan serta peternakan .

4) Pemihakan secara adil dan proporsional kepada agribisnis dan agroindustri dalam hal tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.

   Sebagai suatu sistem industri hayati, kelayakan dan keberlanjutan agribisnis sangat bergantung kepada kesesuaian dan mutu lingkungan hidup dimana kegiatan tersebut berlangsung. Oleb karena itu, lahan-lahan atau perairan subur perlu dipertahankan dan tidak dialihfungsikan untuk kepentingan pembangunan lain seperti kawasan permukiman dan industri. Sementara itu, lahan atau perairan tersebut harus dilindungi dari degradasi lingkungan, baik berupa pencemaran maupun perusakan fisik secara langsung terhadap habitat tersebut. Lebih jauh, keanekaragaman hayati yang merupakan sumber plasma nutfah dan sumber bahan baku untuk industri farmasi dan kosmetika juga perlu dipertahankan kelestariannya.

5) Peningkatan mutu sumberdaya manusia pelaku agribisnis dan agroindustri.
   Untuk mendukung pembangunan di atas diperilukan SDM (petani, birokrat, peneliti, pelaku bisnis/swasta) yang tangguh dan handal. Sampai saat ini mutu SDM agribisnis dan agroindustri Indonesia lebih rendah daripada negara-negara lain di lingkungan ASEAN.
6) Pemberdayaan kelembagaan agribisnis dan agroindustri.
   Ketiga komponen utama sistem kelembagaan agribisnis dan agroindustri yang meliputi lembaga sistem usaha tani, lembaga birokrasi dan lembaga pengembangan IPTEK perlu diberdayakan. Selain itu, koordinasi dan kerjasama semua lembaga di atas juga diperbaiki.
7) Peningkatan penegakan hukum yang mendukung keberhasilan pembangunan agribisnis dan agroindustri.
   Untuk menjamin kelestarian produksi dan kepastian berusaha diperlukan tatanan hukum yang jelas, berwibawa dan adil. Oleh karena itu, perangkat hukum yang ada dan benar harus ditegakkan dan aspek-aspek yang belum ditata secara hukum perlu segera dibuat perangkat hukumnya. Hal ini sangat penting di dalam mengembangkan dan mengkomersialkan hasil penelitian dan pengembangan yang bercirikan agribisnis dan agroindustri spesifik indonesia.

4. PENUTUP

Mega sektor agribisnis dan agroindustri memerlukan komitmen pengembangannya yang segera, dan dapat dijadikan sebagai andalan nasional. Pengembangan agribisnis dan agroindustri akan mampu menolong bangsa Indonesia mengatasi krisis moneter dan ekonomi, serta pada akhirnya mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju kokoh dan mandiri.

Pengembangan agribisnis dan agroindustri secara terpadu diharapkan dapat menciptakan kelima indikator keberhasilan suatu negara, sebagai berikut:

1. Menghasilkan produk (komoditi) pertanian yang berdaya saing dan memiliki nilai tambah dengan ciri-ciri berkualitas tinggi, berukuran seragam, berkesinambungan dan kecukupan pengadaan secara tepat waktu, ramah lingkungan, dan persyaratan lain yang dikehendaki konsumen.
2. Meningkatkan perolehan devisa dan kontribusi terhadap PDB (produk Domestik Bruto) Nasional.
3. Menyediakan lapangan kerja.
4. Meningkatkan kesejahteraan segenap pelaku agribisnis dan agroindustri, khususnya petani, nelayan, peternak dan masyarakat di sekitar lahan usaha.
5. Memelihara mutu dan daya dukung lingkungan, sehingga pembangunan agribisnis dan agroindustri dapat beriangsung secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Gumbira-Sa'id,E. dan A. Nuraini (1998). Prospek bioteknologi dalam memperkuat daya saing agribisnis era Asia Pasifik (makalah akan dipublikasikan di Jurnal Agribisnis Asia Pasifik).

Gumbira-Sa'id, E. dan Burhanuddin (1997) Kawasan Agribisnis Modern Memacu Pengembangan Wilayah, Kompas, 15 Januari 1996.

Habibie, B.J. (1998). Industri Strategis dan Industrialisasi, Materi Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR, 10 Februari 1998 (Republika, 11Februari 1998).

Indonesia (1997a). Indonesia: trade and investment guide. Jakarta (Http:/www.indonesiatoday.com)

Indonesia (1997b). Indonesia: Food for All, The Development of Agriculture in Indonesia, Jakarta (Http: www.indonesia today.com).

Nurendah, Y (1997). Kajian pemanfaatan limbah kayu melalui teknologi bebas limbah di PT ITCI, Bogor: MMA-IPB (laporan tidak dipublikasikan).

PSP-IPB (1997a). Pengembangan Sektor Agribisnis dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Indonesia. Bogor: PSP-IPB.

PSP-IPB (1997b). Pertumbuhan Sektor Pertanian, Terutama Tanaman Bahan Makanan dan Peternakan, Selama Repelita VI dan Implikasinya. Bogor: PSP-IPB.

Saono, S. Wijsnuprapto, Karossi, A.T. dan Sukara, E. (1994). Indonesian Directory of Biotechnology, Jakarta: LIPI.

Solahuddin, S.(1997). Integration of environmental issues and zero emission concept on the education and research activities at Bogor Agricultural University. The 3 rd World Conference on Zero Emission. Jakarta, July 31 -August 2, 1997.

Solahuddin, S. (1998). Pembangunan Pertanian Memasuki Abad 21. Bogor: IPB.